



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

PERNYATAAN KEPADA AMERIKA SERIKAT DAN ASEAN TENTANG MYANMAR

Pernyataan kepada Amerika Serikat dan ASEAN mengenai Myanmar sebelum pertemuan puncak di Washington

Anggota parlemen dari Asia Tenggara mendesak Amerika Serikat dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk mengambil kesempatan pertemuan puncak yang akan datang di Washington untuk meningkatkan tekanan pada junta militer Myanmar, yang melakukan kudeta pada Februari tahun lalu dan telah sejak itu menjerumuskan negara ini ke dalam kekacauan.

Para pemimpin ASEAN dan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa mereka berniat meningkatkan kemitraan strategis mereka demi keuntungan bersama rakyat ASEAN dan Amerika Serikat. Dalam semangat itu, Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) menganjurkan agar kedua pihak harus mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi ancaman bagi perdamaian, pembangunan ekonomi dan keamanan manusia di Asia Tenggara yang ditimbulkan oleh krisis di Myanmar.

“Jadikan peringatan 45 tahun hubungan AS-ASEAN ini menjadi kesempatan bagi pemerintah AS dan ASEAN untuk memulai tahap baru dalam hubungan mereka yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan menempatkan hak asasi manusia dan pencegahan kekejaman, di Myanmar dan di tempat lain, di puncak agenda. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan ancaman junta Myanmar terhadap keamanan jutaan orang di jantung Asia Tenggara,” kata Charles Santiago, Anggota Parlemen dari Malaysia, dan Ketua APHR.

Krisis saat ini sepenuhnya dan semata-mata disebabkan oleh junta, di bawah pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Penduduk Myanmar dengan gagah berani menentang kudeta dan, untuk memaksakan kekuasaannya atas negara itu, militer telah melakukan kekejaman yang meluas. Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, ini boleh jadi merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam setahun terakhir, militer Myanmar telah sepenuhnya mengabaikan Lima Butir Konsensus ASEAN tentang Myanmar, yang disepakati pada April 2021 dan juga didukung oleh AS. Kekerasan terus berlanjut, tidak ada dialog antara junta dan pasukan yang menentang kekuasaan militer, dan bantuan kemanusiaan tidak sampai ke rakyat Myanmar.

Pertemuan Puncak ini akan memberikan kesempatan sempurna bagi bekerja pada langkah-langkah terkoordinasi guna membuat Min Aung Hlaing dan junta-nya membayar kegagalan mereka mematuhi kesepakatan yang diklaim disepakati.

“Kemanusiaan adalah benang merah kita di Pasifik dan di seluruh dunia. Kita harus berdiri bersama dalam menghadapi kekejaman ini, Asia dan Amerika, karena kita memiliki kepedulian yang sama terhadap rakyat Myanmar. Sekarang saatnya bagi ASEAN dan AS untuk membuat aliansi bersejarah mereka benar-benar bermakna bagi orang-orang yang sangat membutuhkan,” kata Mercy Barends, Anggota Parlemen Indonesia dan Anggota Dewan APHR.

Kami mendesak AS dan ASEAN untuk mengambil langkah-langkah yang jauh lebih kuat daripada yang telah diambil sejauh ini, termasuk penangguhan keanggotaan Myanmar dalam perhimpunan ini, larangan bepergian di kawasan untuk Min Aung Hlaing dan para jenderal, dan sanksi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kudeta. AS telah memberlakukan beberapa sanksi sejak kudeta, tetapi harus memperkuatnya dan mencakup Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), sebuah konglomerat negara yang telah memberikan 1,5 miliar dolar pendapatan gas kepada junta.



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Kami juga mendesak pemerintah AS dan ASEAN untuk secara terbuka bertemu dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang mewakili pemerintah yang dipilih secara demokratis dan yang menerima dukungan dari mayoritas rakyat Myanmar.

Terakhir, kami menyerukan Amerika Serikat dan ASEAN bekerja sama guna segera memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa yang dibutuhkan rakyat Myanmar. Bantuan ini harus disalurkan sebanyak mungkin melalui organisasi berbasis komunitas dan masyarakat sipil Myanmar, untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan secara efektif. Amerika Serikat dan negara-negara anggota ASEAN, terutama Thailand, juga harus menerima para pengungsi Myanmar yang melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan, dan memberi mereka suaka.

APHR siap membantu AS dan ASEAN dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan mereka dalam mengatasi krisis ini, dan akan tetap waspada untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh AS dan ASEAN benar-benar mendukung aspirasi rakyat Myanmar akan hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi.